REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00201848030, 3 Oktober 2018
Pencipta		
Nama	:	**MUHAMMAD SALISUL KHAKIM**
Alamat	:	Pakajangan Gang 16 Rt.030/Rw.011 Kel./Desa Pekajangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah, Pekalongan, Jawa Tengah, 51173
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**MUHAMMAD SALISUL KHAKIM**
Alamat	:	Pakajangan Gang 16 Rt.030/Rw.011 Kel./Desa Pekajangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah, Pekalongan, Jawa Tengah, 51173
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan	:	**GERAKAN ISLAM POPULIS DALAM MENJEMBATANI POLITIK ISLAM DAN NEGARA**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	1 Juni 2018, di Jakarta
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000119639

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Gerakan Islam Populis dalam Menjembatani Politik Islam dan Negara

M. Salisul Khakim

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memahami gerakan Islam yang bersifat populis dalam menghubungkan politik Islam dengan negara. Pergerakan umat Islam di Indonesia dibangun dari kalangan rakyat yang kemudian berkembang membentuk suatu organisasi sosial maupun politik dalam skala nasional. Muhammadiyah menjadi salah satu teladan dalam gerakan tersebut yang berorientasi pada modernisasi dan pembaruan dalam membangun negara. Populisme Islam ini menjadi suatu representasi sistem demokrasi untuk mewujudkan kepentingan politik Islam dalam bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak berhadap-hadapan dengan ideologi negara, melainkan menjadi sinergi paham yang kompleks dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara universal.

Kata Kunci: Populis, Islam, Negara, Politik, Demokrasi, Muhammadiyah

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang diakui di negara yang mayoritas populasinya adalah Muslim ini membuat arah pergerakan masyarakat lebih cenderung ke arah nilai-nilai yang bersifat islami, walaupun pada sisi yang lain terdapat ideologi negara yang berjalan beriringan dalam mewujudkan tujuan nasional. Populisme sebagai paham yang mengakui dan menjunjung kepentingan mayoritas masyarakat,

membuat kepentingan ajaran-ajaran agama Islam perlu diakomodasi oleh negara. Hal tersebut membuat munculnya gerakan-gerakan Islam populis yang memperjuangkan kepentingan dan haknya dalam berbangsa dan bernegara.

Populisme Islam adalah sebuah upaya membentuk artikulasi transformasi pelbagai identitas sosial politik Islam ke dalam satu identitas semi universal, yaitu umat. Konsep umat adalah *political frontier* atau batas akhir dari proses diskursif pembentuk blok hegemonik atas kekuasaan negara. Identitas umat merupakan pelbagai variasi kelas, ras, etnis dileburkan.[1] Populisme ini merupakan bentuk persamaan dan persatuan umat Muslim Indonesia terhadap pemahaman kehidupan sosial dan politik dalam proses jalannya pemerintahan negara, yang terakumulasi dari keyakinan akan perubahan sistem tatanan negara yang lebih baik dengan berdasarkan sudut pandang nilai-nilai Islam.

Populisme dalam perspektif Islam muncul sebagai sikap ketidakpuasan terhadap elit politik negara dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakaan yang tidak sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat Muslim. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara menjadikan ketakutan dan trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sehingga membuat masyarakat merasa perlu untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan negara, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi bahkan menggantikan sistem pemerintahan tersebut.

Trauma terhadap politik aliran dan kepemimpinan nasional yang tidak efektif, membuat rakyat lebih memilih pemimpin berbasis kinerja daripada ideologi. Meskipun simbol keIslaman memainkan sentimen pemilih Muslim, namun selama yang ditawarkan bersifat normatif, maka hampir dipastikan masyarakat tidak tertarik.[2] Masyarakat yang mulai terbuka dan terlibat aktif dalam partisipasi politik sekarang lebih cenderung berfikir kritis setelah melalui proses pembelajaran politik pada era-era sebelumnya, sehingga lebih mengutamakan populisme yang memihak pada kepentingan rakyat. Kualitas dan kinerja dalam kepemimpinan yang konkrit menjadi daya tarik bagi masyarakat luas yang diharapkan menjadi tokoh panutan bagi elit pejabat lainnya.

Basis sosial dalam kontekstualisasi situasi ini di Indonesia dapat bercermin dari faktor sejarah, yaitu antara Muslim nasionalis dengan Muslim religius dalam memperdebatkan dasar negara menjelang proklamasi kemerdakaan.

1 Untung Widyanto, Populisme Islam: Tak Ada Kelas Borjuasi Islam Indonesia, diunduh dari halaman https://m. tempo.co/read/news/2017/01/23/078838912/populisme-islam-2-tak-ada-kelas-borjuasi-islam-indonesia, diakses pada 15 Juni 2017 pukul 11.15 WIB.

2 Pradana Boy Z.T.F., Masa Depan Politik Kaum Islamis di Indonesia, *MAARIF*, Vol. 8 No. 2, 2013, Hal. 51.

Kedua golongan ini saling mempertahankan argumentasinya dalam menjaga komitmen dan keyakinan agama yang akan diterapkan sebagai pondasi tatanan negara. Peristiwa tersebut saat ini seakan muncul kembali dengan momentum yang lebih pada menjaga konsistensi negara dalam menjalankan ideologinya, serta mengevaluasi jalannya pemerintahan negara yang ditakutkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya cenderung otoriter dan korup. Populisme Islam ini dapat dikatakan sebagai bentuk frustrasi politik Islam di tengah sistem demokrasi formal yang memiliki banyak catatan negatif dalam perjalanan sejarah, hingga pada akhirnya berkembang dan memunculkan kompetisi politik kontemporer yang bersaing dengan mengandalkan isu kepemimpinan populis, yaitu dengan basis jumlah masa yang besar dan berasal dari berbagai kalangan masyarakat.

Kepemimpinan populis merupakan pemimpin yang memiliki kriteria utama yang keputusan adalah suara nyata atau suara yang diharapkan rakyat. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan oportunistik, yang bisa dikatakan sebagai pemimpin pelayan, melayani apa yang orang ingin lakukan.[3] Prinsip kepemimpinan populis ini dapat menjadi menjadi jalan tengah terhadap perdebatan politik Islam dengan negara, sehingga menjadi bentuk rekonsiliasi bagi pergerakan masyarakat ataupun organisasi yang berasaskan pada nilai-nilai Islam murni yang juga aktif dalam membangun peradaban bangsa.

Dilihat dari perspektif rekonsiliasi gerakan pembaruan, pernyataan-pernyataan intelektual aliran transformasi sosial lebih kompleks. Kompleksitasnya terletak pada pilihan agenda yang bercorak populis dan berorientasi masyarakat, serta pada nada politis yang tampak mengarahkan pembentukan masyarakat yang *vis a vis* negara.[4] Agenda yang menitikberatkan pada masyarakat luas menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk diperjuangkan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat yang terkotak-kotakkan dalam dinamika perkembangan politik saat ini, bahkan seolah-olah terdapat dua pihak yang saling berhadap-hadapan dalam mencapai tujuannya masing-masing.

Setiap pihak memiliki paham dan pandangan tersendiri terhadap kajian permasalahan politik negara, serta masing-masing pihak juga memiliki basis masyarkat dalam jumah besar yang terdiri dari berbagai kalangan. Belum lagi jika berbicara masyarakat lain di luar pihak yang saling berhadap-hadapan ini,

3 Christoph Stückelberger, *Responsible Leadership Handbook: For Staff and Boards*, Geneva: Globethics.net, 2014, Hal. 195.

4 Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011, Hal. 195.

semuanya memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan kepentingannya untuk diakomodasikan dalam negara, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ideologi dan kepentingan negara itu sendiri. Pergerakan Islam populis dalam hal ini menjadi jalan tengah untuk menghubungkan atau mengimplikasikan politik masyarakat Muslim yang mayoritas dengan kepentingan politik negara.

Implikasi Islam Populis dalam Negara

Pasca era Reformasi yang telah membuka keran kebebasan bagi munculnya berbagai ideologi dan pergerakan, beberapa kelompok radikal dengan mengatasnamakan demokrasi, telah memanfaatkan angin kebebasan ini untuk menunjukkan eksistensi dirinya di Indonesia.[5] Gerakan-gerakan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam banyak bermunculan pasca runtuhnya orde baru, karena masyarakat Muslim sebagai populasi terbesar di negara ini merasa memiliki kebebasan dan hak demokrasi untuk menjalankan syariatnya dalam negara. Atas nama rakyat, pergerakan demi pergerakan semakin bebas berkembang dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun dalam penyelenggaraannya terdapat gerakan-gerakan yang bermunculan tersebut memiliki paham yang berhadap-hadapan dengan negara.

Implikasi Islam populis dalam negara dapat dilihat dari hubungan pergerakan politik Islam dengan negara. Pergerakan politik Islam yang berkembang dari masyarakat juga perlu diklasifikasi karena perbedaan paham masyakarat akan menimbulkan kemungkinan bentuk pergerakan yang berbeda pula. Pada satu sisi gerakan Islam populis yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat mayoritas dengan pemahaman yang fanatik dan arah pergerakan fundamental, akan memunculkan gerakan-gerakan yang keras dan radikal. Pada sisi yang lain, hal tersebut tentu berbeda dengan gerakan Islam populis yang juga mengatasnamakan kepentingan rakyat namun bersifat modernis dan reformis tanpa meninggalkan nilai dan ajaran Islam itu sendiri. Pergerakan Islam populis ini cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan dan bersifat toleran, serta menggunakan pemahaman agama untuk kepentingan masyarakat secara luas dalam negara.

5 Muhd. Abdullah Darraz, Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewarganegaraan, *MAARIF*, Vol. 8 No. 1, 2013, Hal. 155.

Populisme Kanan sebagai gerakan oposisional mengancam negara hukum demokratis. Pada sisi sistem politis, gerakan ini mendestabilisasi negara hukum dengan menekan parlemen, mendikte pemerintah, atau mengancam pengadilan. Pada sisi masyarakat, warga mereka meracuni ruang publik dengan *ressentiment* terhadap *elite*, minoritas maupun pendatang.[6] Bentuk ancaman dari oposisi pemikiran Kanan yang identik dengan agama Islam ini memang dapat membuat kekacauan dalam sistem perpolitikan negara dan sistem sosial masyarakat, namun dalam kenyataan negara demokrasi hal ini bukan tidak mungkin menjadi bahan evaluasi, artinya modernisasi dapat berjalan beriringan dengan gerakan Islam yang populis tanpa harus saling menjatuhkan.

Umat Islam Indonesia umumnya bersikap positif terhadap modernitas, namun kelompok garis keras justru bersikap reaksioner. Kelompok garis keras menganut paham absolutisme dan tidak berkompromi, intoleran terhadap berbagai sudut pandang, bahkan keragaman dianggap sebagai kontaminasi kebenaran yang diyakini.[7] Pergerakan dengan paham fundamental dan radikal di negara ini tentu tidak dapat diterima, termasuk juga sistem khilafah. Gerakan tersebut tidak toleran dan tidak dapat menerima perbedaan, padalal negara ini kaya akan keanekaragaman budaya dan bersifat plural. Dengan demikian, gerakan pembaruan yang bermaksud untuk menjaga nilai-nilai Islam dan mempertahankan kemurnian ajaran agama tersebut perlu dimodifikasi agar dapat bersifat populis dan sejalan dengan ideologi negara.

Pembaruan memang hampir selalu berimplikasi pada semangat pembebasan dan demokratisasi. Tetapi menumbangkan kekuasaan formal bukanlah satu-satunya pilihan yang harus ditempuh, walaupun mayoritas memanfaatkan peluang tersebut, hal itu merupakan keniscayaan sejarah yang sulit dihindari. Sebab pembaruan sendiri bertujuan menawarkan pendekatan-pendekatan yang lebih rasional, dengan konsekuensi yang selalu berhadapan dengan hal-hal yang irrasional.[8] Kedua hal yang berbeda tersebut menunjukkan perlu adanya sinergi atara politik Islam populis dengan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Pendekatan untuk membentuk sinergi tersebut harus mengutamakan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai modal dasar berfikir dan bersikap dari sisi irrasional, hingga mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial

6 F. Budi Hardiman, Gerakan Murka dalam Demokrasi, diunduh dari halaman http://nasional.kompas.com/ read/2017/03/02/19534241/gerakan.murka.dalam.demokrasi, diakses pada 15 Juni 2017 pukul 11.42 WIB.

7 Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia, Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, the Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009, Hal. 166.

8 Asep S. Muhtadi, Menakar Gerakan Pembaruan Muhammadiyah, *MAARIF*, Vol. 5 No. 1, 2010, Hal. 51.

yang komprehensif dari sisi rasional. Hal mendasar lain yang dapat mewujudkan kesejahteraan negara tersebut juga perlu diimbangi nilai kemanusiaan dan semangat persatuan yang dijalankan secara demokratis dan bijaksana.

Pergerakan Islam populis yang terlibat dalam politik negara perlu memiliki dasar pendirian yang tegas dengan tujuan yang jelas, serta menjadi pergerakan yang terstruktur dengan dinamika yang visioner. Dasar pergerakan sebagai organisasi masyarakat yang mayoritas Muslim tentu tidak dapat berhadap-hadapan dengan ideologi negara jika ingin tetap eksis dan berkembang, serta tujuan yang ingin dicapai juga harus sejalan kepentingan negara, bukan hanya kepentingan kelompok atau organisasi tertentu saja.

Organisasi masyarakat yang mayoritas Islam atau pergerakan Islam yang bersifat populis di negara ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan gerakan tersebut juga menjadi bagian cikal bakal perwujudan kebebasan dari penjajah, baik merdeka dari segi pendidikan, sosial hingga kedaulatan negara. Muhammadiyah dalam hal ini menjadi salah satu organisasi besar yang dapat dikatakan bersifat Islam populis, karena keberadaannya dilatarbelakangi oleh perjuangan masyarakat Muslim yang merakyat dan menginginkan kesejahteraan bersama. Pergerakan ini mampu mengimbangi perkembangan dinamika pemerintahan hingga era global saat ini, tanpa membuat pertentangan atau perlawanan terhadap kepentingan negara, bahkan menjadi bentuk sinergi dengan negara dalam melengkapi kekurangan dan kelemahan dalam setiap proses pembangunan negara yang masih belum tercapai.

Islam Populis dalam Pergerakan Muhammadiyah

Sejak awal umat Islam Indonesia telah memiliki sistem politik demokrasi, yang merupakan mekanisme politik yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita politik Islam. Golongan modernis menjadi pembela-pembela demokrasi yang teguh dalam menentang gerakan politik otoritarian.[9] Sistem politik demokrasi telah menjadi bagian dalam perjuangan masyarakat Islam populis dalam perkembangannya, dan pergerakan masyarakat yang cenderung bersifat modernis tersebut akan lebih dinamis dalam proses berbangsa dan bernegara, tanpa perlu membuat perdebatan dan perpecahan yang saling menjatuhkan, baik dengan pergerakan masyarakat lain maupun dengan pemerintahan negara itu sendiri.

9 Ahmad S. Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebadan Konstituante, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, Hal. 127.

Muhammadiyah pada awal sejarahnya membawa misi mempersiapkan masyarakat Muslim di tanah air menyongsong kehidupan modern/urban. Organisasi ini merupakan kekuatan progresif yang tidak radikal, walaupun pemikirannya dianggap revolusioner dalam gerakan-gerakan dakwah dan pendidikan.[10] Perkembangan dan kemajuan negara yang bersifat dinamis menuntut setiap masyarakat dan pergerakannya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi nasional dan global. Muhammadiyah dalam hal ini telah mempersiapkan masyarakat Muslim dalam mengikuti kehidupan modern yang dikuatkan dengan gerakan pembaruan atau purifikasi, artinya tuntutan peradaban yang selalu berkembang dan berkemajuan selalu diimbingi dengan nilai-nilai Islam yang sudah ada sejak dahulu sesuai ajaran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pergerakan ini dapat dikatakan menjadi organisasi masyarakat yang populis, karena gerakannya yang selalu bersumber dan didukung oleh kepentingan masyarakat luas. Muhammadiyah juga menjadi kekuatan umat Islam dalam memperluas konsep umat menuju *citizenship*, yang memungkinkan untuk merangkul kelas borjuasi yang berasal dari etnis minoritas. Hal ini karena metode dakwah dan pendidikan yang dijalankan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh organisasi ini mampu membangun komitmen dan kepercayaan masyarakat, yang terstruktur mulai dari level pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan/desa.

Kontribusi pembangunan negara dari pusat hingga daerah ditunjukkan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk berbaur dan bergabung. Sementara itu, pembangunan lembaga rumah sakit, lembaga perekonomian, serta lembaga atau amal usaha lainnya dalam organisasi ini telah menyentuh hati masyarakat luas dan mendasari pergerakan Islam yang bersifat populis.

Gerakan Muhammadiyah tidak hanya semata-mata membangun kepentingan agama dari sisi akhirat saja, melainkan juga kepentingan masyarakat secara duniawi sebagai jalan kepentingan bersama dalam mewujudkan negara yang baik dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkembangan organisasi yang lebih dari satu abad berdiri ini juga telah menunjukkan kontribusi besar terhadap pembangunan peradaban bangsa dan negara, serta menjadi teladan bagi pergerakan masyarakat lainnya dalam menjaga konsistensi dan mewujudkan visinya.

10 Endi Bayuni, Muhammadiyah, antara Gerakan Progresif atau Konservatif, *MAARIF*, Vol. 5 No. 1, 2010, Hal. 60.

Muhammadiyah bukan satu-satunya organisasi yang melakukan pembaruan dalam Islam, karena Indonesia merupakan konteks salah satu takaran utama untuk melihat konsistensi gerakan, baik konsisten dalam pempribumian dan penzamanan maupun konsisten dari sisi sejarah yang dilaluinya sejak awal hingga saat ini.[11] Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dinamika negara demokrasi ini memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan golongan, termasuk banyak organisasi pergerakan yang menjadi media masyarakat dalam mengaktualisasikan kepentingan individu, kelompok, hingga kepentingan negara.

Corak keberagaman organisasi menjadi keniscayaan dalam negara yang plural ini. Selama pergerakan tersebut dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta memiliki dasar dan acuan yang sama berdasarkan pada ideologi negara, maka pergerakan lainnya pun menjadi suatu hal yang saling melengkapi kekurangan dan kelemahan satu sama lain. Begitu juga halnya dengan organisasi besar selain Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama yang juga dapat dikatakan merupakan gerakan Islam populis karena jumlah anggotanya yang sangat banyak dan terdapat hingga pelosok-pelosok daerah, dengan dengan gaya pergerakan yang cenderung kepada arah tradisionalisme yang sudah ada di nusantara sejak dahulu.

Revitalisasi tradisionalisme agama diperlukan dalam bentuk memasukkan unsurunsur rasional ke dalamnya, hingga modernisme agama itu sendiri dapat dirasakan sebagai kebutuhan, baik di kalangan elitis yang diwakili para cendekiawan, maupun rakyat jelata yang mengembangkan tradisionalisme agama populis.[12] Kedua organisasi yang memiliki arah pergerakan dan kecenderungan tradisionalisme dan modernism tersebut menjadi suatu sinergi yang harmonis dalam membangun negara.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang telah berdiri lebih awal dalam hal ini juga perlu terbuka dan belajar dari berbagai kalangan dan kelompok masyarakat Muslim lainnya dalam memperbaiki diri untuk terus berkembang dan berkemajuan. Gerakan ini tetap perlu melakukan refleksi dalam revitalisasi dan reaktualisasi ideologi pergerakan agar dapat berkomitmen dan berkelanjutan dalam membangun persyarikatan dan negara, serta perlu membangun dan mengembangkan pemikiran Muhammadiyah secara lebih luas dan mendalam kepada masyarakat sebagai basis pergerakan Islam populis.

11 Asep S. Muhtadi, *Ibid*, Hal. 44.

12 Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006, Hal. 37.

Langkah revitalisasi ideologi Muhammadiyah dilakukan dengan memantapkan arah dan langkah sebagai gerakan Islam yang bergerak dalam bidang dakwah dan *tajdid*, serta tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga dapat bergerak leluasa ke segala penjuru dan golongan masyarakat.[13] Membangun pergerakan Islam yang populis dalam artian positif membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam jumlah kuantitas yang besar, dengan melakukan dan menghasilkan kegiatan yang berkualitas, yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan negara dan masyarakat secara luas itu sendiri.

Muhammadiyah dengan pergerakan dakwah dan *tajdid* menjadikan organisasi masyarakat Muslim ini diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, karena sifatnya yang merakyat serta dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat Muslim dalam perpolitikan dengan negara. Partisipasi politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah memang tidak terlibat secara praktis, namun bukan berarti acuh atau tidak peduli terhadap politik negara.

Pergerakan ini juga memiliki panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tertuang dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM). Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah. Perpolitikan organisasi ini dilakukan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah, serta tidak mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.

Hal di atas telah menunjukkan bahwa pergerakan Islam perlu mengimbangi kepentingan negara sebagai kekuasaan formal, dan begitu pula sebaliknya. Artinya, ada sesuatu yang memang diperlukan untuk dapat menghubungkan atau menjembatani antara kedua hal tersebut, sehingga kepentingan politik Islam dan negara dapat saling terakomodasi dan dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Menjembatani Politik Islam dan Negara

Populisme Islam di Indonesia gagal membentuk *political frontier* dan identitas umat yang hegemonik. Faktor utama kegagalan ini karena ketidakmampuan membentuk sebuah aliansi antarkelas yang menjangkau jauh dan populisme Islam di Tanah Air juga gagal menguasai negara dan *civil society*.[14] Batas akhir

13 Muhammad Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016, Hal. 217.

14 Untung Widyanto, Populisme Islam: Militer Gunakan Islam Hantam Kaum Kiri, diunduh dari halaman https:// nasional.tempo.co/read/news/2017/01/23/078838920/populisme-islam-3-militer-gunakan-islam-hantam-kaum- kiri, diakses pada 15 Juni 2017 pukul 11.25 WIB.

dari proses diskursif pembentuk blok hegemonik atas kekuasaan negara tidak dapat terwujud dengan identitas umat Islam yang hegemonik pula. Hal ini kemudian menjadi pembelajaran bagi mayoritas masyarakat Muslim dalam proses berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Menghubungkan politik Islam dengan negara berkaitan dengan dinamika ideologi masing-masing. Keterbukaan dan ketertutupan ideologi akan menentukan sejauhmana kedua prinsip tersebut dapat berkolaborasi dan bersinergi, atau mungkin sebaliknya, masing-masing prinsip saling berhadap-hadapan dan memperkuat argumentasi untuk kepentingannya sendiri. Namun demikian, jika dalam perkembangan negara muncul tuntutan agar kedua pihak tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan visioner, maka dapat dikatakan perlu adanya depolarisasi ideologi sebagai bentuk sinkronisasi pemahaman antar kedua belah pihak yang terkait.

Depolarisasi ideologi atau deideologisasi merupakan muara dari rasionalisme dan pragmatisme. Rasional membuat seseorang semakin mudah melepaskan diri dari postulat ideologis dalam melihat masalah sehingga mudah berkompromi dengan pandangan berbeda. Sebaliknya, pragmatis membuat seseorang semakin mudah melampaui batasan-batasan ideologis dengan memberikan keuntungan.[15] Dalam hal ini, maka diperlukan sisi rasional untuk menghubungkan politik Islam dengan negara dengan menyatukan kesamaan persepsi ideologi, yang juga diikuti dengan sisi pragmatis dengan memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat yang mayoritas Muslim tersebut.

Pergerakan Islam populis dalam menjembatani jurang ideologis antara Islam politik dan negara ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu:

> "Islam tidak boleh berdiri dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan negara. Dalam hal ini, yang khususnya sangat penting adalah tidak menempatkan Pancasila sebagai hal yang bertentangan dengan Islam. Melainkan, keduanya harus dipandang sebagai saling melengkapi. Pandangan khusus ini tumbuh dari pemahaman religio politik bahwa tiap sila dalam Pancasila (kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial) sejalan dengan ajaran Islam. Karena itu, sama sekali tidak penting bagi para pendukung Islam politik, dan bukan pula kewajiban keagamaan mereka, untuk mempertanyakan legitimasi negara Indonesia yang secara formal didasarkan kepada sebuah ideologi yang *non* religius meskipun itu sama sekali tidak berarti tidak religius, apalagi anti agama."[16]

15 Muhammad As Hikam, *Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah*. Jakarta: Rumah Buku, 2014. Hal: 107.

16 Bachtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011, Hal. 182.

Secara sosiologis, berkaitan dengan proses menjembatani ini sebenarnya ada keharusan intrinsik bagi para politisi Muslim untuk memainkan peran penting dalam proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan di Indonesia, semata-mata karena kaum Muslim adalah kelompok masyarakat terbesar di negara ini.[17] Selain menempatkan posisi politik Islam yang sejalan dengan politik negara yang berdasarkan Pancasila, para politisi Muslim juga perlu ikut serta dalam perpolitikan negara. Hal ini menjadi penting ketika politisi ini menjadi elit pejabat negara, karena kebijakan yang diperlukan dalam membangun negara tersebut juga perlu diikuti dengan mengakomodasi kepentingan politik Islam secara populis.

Pada sisi yang lain, kaum Muslim juga perlu membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap berbagai persoalan negara. Kedekatan politis dan ideologis yang kuat ini diharapkan bahwa ruang untuk berlangsungnya konfrontasi-konfrontasi yang tidak perlu secara politis maupun ideologis perlahan-lahan semakin menyempit.[18] Sinergi yang terbentuk dari kedekatan politis dan ideologis ini membuat ruang gerak masyarakat Muslim dan negara tanpa sekat, sehingga kedua belah pihak dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di bangsa, dan dapat saling bekerjasama dalam membangun negara untuk terus berkembang dan berkemajuan. Masyarakat Muslim dapat berafiliasi dalam berbangsa dan bernegara dengan berkontribusi membentuk organisasi Islam, partai politik Islam ataupun asosiasi sesuai kebutuhan masyarakat Muslim lainnya yang dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan nasional.

Partai Islam harus mau bergerak pada perjuangan isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Partai Islam harus mengambil isu-isu populis yang terkait dengan kepentingan rakyat banyak seperti soal kemandirian pangan, subsidi pertanian, pendidikan murah, dan lain sebagainya.[19] Organisasi masyarakat Muslim, seperti Muhammadiyah, di abad baru harus siap untuk berjibaku dan menginspirasi aksi-aksi populis dan strategis, dengan memanfaatkan komitmen ideologis dan jaringan sosial dan politik yang dimilikinya, dalam penguatan wacana untuk melakukan pemerataan dan mengurangi berbagai kesenjangan dalam masyarakat.[20] Asosiasi dan

17 Bachtiar Effendy, *Ibid*, Hal. 184

18 Bachtiar Effendy, *Ibid*, Hal. 185

19 Ahmad F. Fanani, Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan, *MAARIF*, Vol. 8, No. 2, 2013, Hal 88.

20 Hilman Latief, Pemerataan Kapasitas: Agenda Pimpinan Muhammadiyah Abad Ke-2, *MAARIF*, Vol. 5 No. 1, 2010, Hal. 84.

pergerakan masyarakat Muslim lainnya pun juga perlu membangun komitmen dalam pencapaian tujuan negara tanpa mengesampingkan kepentingan rakyat sebagai aspirasi yang bersifat populis.

Penutup

Pergerakan Islam populis muncul sebagai bentuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap politik negara yang dinilai tidak dapat mengakomodasi kepentingan mayoritas masyarakat Muslim. Sementara itu, kemunculan gerakan ini juga sangat terkait dengan ketakutan atau trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara yang membuat tujuan nasional semakin jauh dari harapan bersama. Faktor sejarah terkait keterlibatan mayoritas masyarakat Muslim dalam mewujudkan kemerdekaan negara dan pembangunan negara, membuat politik Islam perlu terlibat dalam mengevaluasi sistem pemerintahan negara, bahkan bukan tidak mungkin untuk melakukan modifikasi sistem pemerintahan yang baru untuk mewujudkan tujuan negara secara menyeluruh.

Representatif bentuk pergerakan Islam populis yang memiliki implikasi terhadap politik negara dapat terlihat dari aktivitas sosial dan politik masyarakat Muslim secara individu maupun kelompok yang terorganisir. Pergerakan politik Islam yang berkembang dari masyarakat dapat diklasifikasikan dengan gaya Islam populis yang fanatik dan mengarah pergerakan fundamental, serta gaya Islam populis yang modernis dan reformis tanpa meninggalkan nilai Islam itu sendiri.

Pergerakan Islam populis yang visioner bersumber dari aspirasi dan didukung oleh kepentingan masyarakat Muslim secara luas tanpa mengesampingkan makna toleransi di negara yang plural ini. Metode dakwah dan pendidikan yang dijalankan oleh Muhammadiyah secara komprehensif dan berkelanjutan mampu membangun komitmen dan kepercayaan masyarakat mulai dari level pusat hingga ke pelosok daerah. Sementara itu, pembangunan lembaga rumah sakit, lembaga perekonomian, serta lembaga atau amal usaha lain dalam organisasi ini telah mampu menyentuh hati masyarakat luas dan menjadi basis yang kuat dalam pergerakan Islam populis yang sejatinya.

Kedekatan politis dan ideologis yang kuat sejauh ini mampu menjembatani politik Islam dan negara, yaitu dengan menempatkan nilai Islam yang sejalan dengan ideologi negara, dan membangkitkan kembali rasa memiliki bagi politisi Muslim terhadap berbagai persoalan negara. Hal ini mampu membuat ruang gerak mayoritas masyarakat Muslim dan negara tanpa sekat, sehingga dapat

lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan bangsa yang lebih kompleks. Masyarakat Muslim dapat berafiliasi dalam berbangsa dan bernegara dengan berkontribusi membentuk organisasi Islam, partai politik Islam ataupun asosiasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Muslim untuk bersinergi dalam mewujudkan kesejahtaraan bersama.

Daftar Pustaka

Bayuni, Endi M. Muhammadiyah, antara Gerakan Progresif atau Konservatif. *MAARIF*. 5.1 (2010): 54-60.

Boy, ZTF Pradana. Masa Depan Politik Kaum Islamis di Indonesia. *MAARIF*. 8.2 (2013): 38-54.

Darraz, Muhd. Abdullah. Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *MAARIF.* 8.1 (2013): 154-173.

Effendy, Bachtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

Fanani, Ahmad F. Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan. *MAARIF.* 8.2 (2013): 72-95.

Hardiman, F. Budi, *Gerakan Murka dalam Demokrasi*, diunduh dari halaman http://nasional.kompas.com/read/2017/03/02/19534241/gerakan.murka.dalam.demokrasi, diakses pada 15 Juni 2017 pukul 11.42 WIB.

Hikam, Muhammad As. *Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah*. Jakarta: Rumah Buku, 2014.

Latief, Hilman. Pemerataan Kapasitas: Agenda Pimpinan Muhammadiyah Abad Ke-2. *MAARIF.* 5.1 (2010): 77-86.

Maarif, Ahmad S. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebadan Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Muhtadi, Asep S. Menakar Gerakan Pembaruan Muhammadiyah. *MAARIF.* 5.1 (2010): 43-53.

Nashir, Muhammad. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000.

Stückelberger, Christoph. *Responsible Leadership Handbook: For Staff and Boards.* Geneva: Globethics.net, 2014.

Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, the Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009.

Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Widyanto, Untung, *Populisme Islam: Militer Gunakan Islam Hantam Kaum Kiri*, pada halaman https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/23/078838920/populisme-islam-3-militer-gunakan-islam-hantam-kaum-kiri, diakses pada 15 Juni 2017 pukul 11.25 WIB.

Widyanto, Untung, *Populisme Islam: Tak Ada Kelas Borjuasi Islam Indonesia*, diunduh dari halaman https://m.tempo.co/read/news/2017/01/23/078838912/populisme-islam-2-tak-ada-kelas-borjuasi-islam-indonesia, diakses pada 15 Juni 2017 pukul 11.15 WIB.